PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PEMERINTAH DESA

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NO. 2 LD 2024/ NO. 2, LD. 2

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan implementasi transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perbup Wonogiri No. 39 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Wonogiri ini mengatur pelaksanaan Transaksi Nontunai terhadap penerimaan Desa, pengeluaran Desa dan pembayaran Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024